Jurnal Pendidikan Amartha
Volume 5 Nomor 2 November 2026
P-ISSN: 2964-7916 E-ISSN: 2964-1675

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Nilai dalam Pembentukan Karakter Warga Negara

Raihan Ryandhika
Teknologi Rekayasa Mekatronika, Politeknik Manufaktur Bandung, Indonesia
Email: 222442019@mhs.polman-bandung.ac.id

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan strategis sebagai wahana pendidikan nilai yang bertujuan membentuk karakter warga negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artikel ini bertujuan menganalisis PKn sebagai pendidikan nilai melalui kajian konseptual dan empiris terkait peran, pendekatan pembelajaran, serta implementasinya dalam pembentukan karakter peserta didik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan menelaah jurnal ilmiah nasional yang relevan dengan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan karakter, dan penanaman nilai Pancasila. Hasil kajian menunjukkan bahwa PKn tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga menekankan pembentukan sikap, moral, dan perilaku demokratis peserta didik. Dengan pendekatan pembelajaran yang kontekstual, partisipatif, dan reflektif, PKn berfungsi sebagai instrumen utama dalam menanamkan nilai nasionalisme, tanggung jawab, toleransi, dan integritas. Oleh karena itu, penguatan PKn sebagai pendidikan nilai menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan moral dan sosial di era modern.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Nilai, Karakter, Pancasila

Abstract

Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan/PKn) plays a strategic role as a value-based education aimed at shaping the character of citizens grounded in Pancasila and the 1945. Constitution of the Republic of Indonesia. This article aims to analyze Civic Education as value education through a conceptual and empirical review of its roles, learning approaches, and implementation in character formation among students. The research method employed is a qualitative literature review by examining relevant national academic journals on civic education, character education, and the internalization of Pancasila values. The findings indicate that Civic Education is not solely oriented toward the acquisition of civic knowledge but also emphasizes the development of attitudes, moral values, and democratic behavior among learners. Through contextual, participatory, and reflective learning approaches, Civic Education serves as a primary instrument for instilling nationalism, responsibility, tolerance, and integrity. Therefore, strengthening Civic Education as value-based education is an urgent necessity in addressing moral and social challenges in the modern era.

Keywords: *Civic Education, Value Education, Character Education, Pancasila*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran strategis dalam pengembangan sumber daya manusia sekaligus pembentukan karakter warga negara yang mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, mandat tersebut secara normatif ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menempatkan pengembangan kemampuan, pembentukan watak, dan pembangunan peradaban bangsa sebagai bagian integral dari fungsi pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak semestinya hanya diukur berdasarkan capaian akademik dan penguasaan pengetahuan, tetapi juga berdasarkan kemampuannya menumbuhkan nilai moral, tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap

keberagaman, dan komitmen terhadap kehidupan demokratis. Perspektif ini menempatkan pendidikan karakter sebagai dimensi substantif dalam penyelenggaraan pendidikan, bukan sekadar pelengkap proses pembelajaran (Samani & Hariyanto, 2011; Zuriah, 2021).

Dalam kerangka tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki posisi penting sebagai wahana pembentukan karakter kewargaan yang berlandaskan Pancasila. PKn tidak hanya berfungsi memperkenalkan konsep konstitusi, hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta sistem politik, tetapi juga berpotensi mengembangkan orientasi nilai dan disposisi kewargaan yang diperlukan untuk menghadapi persoalan sosial dalam masyarakat majemuk. Pembelajaran PKn idealnya mengintegrasikan dimensi pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan berpartisipasi, dan karakter kewargaan sehingga peserta didik tidak hanya memahami prinsip kehidupan berbangsa, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pengambilan keputusan dan interaksi sosial sehari-hari. Sejumlah kajian mengenai pembelajaran kewarganegaraan dan pendidikan karakter di Indonesia telah membahas peran PKn dalam mengembangkan nasionalisme, memperkuat karakter moral, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila (Dewi & Abdulkarim, 2018; Gunawan & Najicha, 2022; Hasan, 2022; Zuriah, 2021). Temuan dan argumentasi dalam kajian-kajian tersebut menunjukkan relevansi PKn bagi pendidikan nilai, sekaligus menegaskan perlunya perhatian terhadap proses yang menghubungkan pemahaman konseptual dengan pembentukan sikap dan perilaku kewargaan.

Meskipun demikian, integrasi pendidikan nilai ke dalam pembelajaran PKn menghadapi tantangan pada tataran implementasi. Pembelajaran yang terlalu menekankan penyampaian materi, penguasaan definisi, dan penghafalan peraturan berisiko menjadikan nilai-nilai kewargaan sebagai pengetahuan deklaratif, bukan sebagai prinsip yang dihayati dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Dalam kondisi demikian, peserta didik mungkin mampu menjelaskan konsep tanggung jawab, toleransi, demokrasi, dan nasionalisme, tetapi pemahaman tersebut belum tentu tercermin secara konsisten dalam perilaku mereka. Persoalan ini memperlihatkan pentingnya membedakan antara penguasaan pengetahuan mengenai nilai dan internalisasi nilai sebagai bagian dari orientasi moral serta tindakan sosial. Kajian mengenai peningkatan kualitas pembelajaran PKn melalui model bermain peran dan penanaman nilai karakter dalam pembelajaran menunjukkan adanya perhatian akademik terhadap strategi pembelajaran yang dapat memperkuat pengalaman belajar peserta didik (Syam, 2011; Sayektiningsih et al., 2017). Namun, keberadaan strategi pembelajaran saja belum cukup untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai kewargaan dihubungkan dengan pengalaman peserta didik, direfleksikan secara kritis, dan diterapkan dalam konteks sosial yang beragam.

Tantangan tersebut menjadi semakin relevan dalam masyarakat yang ditandai oleh keberagaman identitas, dinamika informasi digital, dan perubahan pola interaksi sosial. Pendidikan kewarganegaraan perlu merespons kondisi tersebut dengan pendekatan yang tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi juga menyediakan ruang dialog, refleksi moral, partisipasi, dan pembiasaan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks ini, pendidikan nilai perlu dipahami sebagai proses pedagogis yang menghubungkan dimensi kognitif, afektif, dan perilaku. Integrasi ketiga dimensi tersebut penting agar pembelajaran PKn tidak hanya menghasilkan peserta didik yang mengetahui norma kewargaan, tetapi juga mampu mempertimbangkan implikasi etis suatu tindakan, menghargai perbedaan, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, efektivitas pendidikan nilai perlu dikaji tidak hanya dari muatan materi yang disampaikan, tetapi juga dari orientasi pembelajaran, pengalaman pedagogis, dan keterkaitannya dengan kehidupan peserta didik.

Walaupun penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara PKn, pendidikan karakter, nasionalisme, dan penanaman nilai Pancasila, masih diperlukan sintesis yang lebih terarah mengenai bagaimana PKn diposisikan sebagai pendidikan nilai, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara tujuan normatif, praktik pembelajaran, dan proses internalisasi nilai. Kesenjangan yang menjadi perhatian dalam tulisan ini bukan semata-mata kurangnya pembahasan mengenai pentingnya pendidikan karakter, melainkan perlunya pemahaman yang lebih sistematis mengenai mekanisme pedagogis yang memungkinkan nilai-nilai kewargaan bergerak dari tataran pengetahuan menuju sikap dan perilaku. Penegasan kesenjangan ini penting agar pembahasan PKn tidak berhenti pada pernyataan normatif mengenai peran strategis mata pelajaran tersebut, tetapi dapat menghasilkan argumentasi konseptual yang relevan bagi pengembangan pembelajaran.

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan nilai dalam pembentukan karakter peserta didik, dengan menelaah landasan konseptual pendidikan nilai, tantangan implementasinya dalam pembelajaran, serta implikasinya bagi pengembangan praktik pedagogis yang lebih bermakna. Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan posisi PKn sebagai proses pendidikan yang mengintegrasikan pengetahuan kewargaan, refleksi moral, dan perilaku sosial. Secara praktis, pembahasan ini dapat menjadi landasan untuk merancang pembelajaran PKn yang lebih kontekstual, reflektif, partisipatif, dan berorientasi pada internalisasi nilai-nilai Pancasila.

Kajian Pustaka

Konsep Pendidikan Nilai

Pendidikan nilai merupakan proses pedagogis yang bertujuan membantu peserta didik memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai moral, etika, dan sosial dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Dalam perspektif pendidikan karakter, nilai tidak cukup dipahami sebagai seperangkat prinsip normatif yang disampaikan melalui pembelajaran, tetapi perlu dikembangkan menjadi orientasi moral yang memengaruhi cara individu berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak dalam situasi konkret (Maksudin, 2013; Samani & Hariyanto, 2011). Dengan demikian, pendidikan nilai mencakup dimensi kognitif berupa pemahaman terhadap nilai, dimensi afektif berupa penerimaan dan penghayatan nilai, serta dimensi perilaku berupa penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga dimensi tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi. Pemahaman kognitif memungkinkan peserta didik mengenali makna dan alasan di balik suatu nilai, sedangkan penghayatan afektif membantu membangun komitmen terhadap nilai tersebut. Selanjutnya, penerapan perilaku menjadi salah satu indikator bahwa nilai telah digunakan sebagai dasar dalam bertindak. Namun, hubungan antara ketiganya tidak berlangsung secara otomatis. Peserta didik yang mengetahui prinsip kejujuran, misalnya, belum tentu selalu bertindak jujur ketika menghadapi tekanan sosial atau kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pendidikan nilai perlu menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik menghubungkan pengetahuan moral dengan pertimbangan etis, refleksi diri, dan tindakan nyata.

Dalam pendidikan formal, pendidikan nilai dapat diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran melalui materi pembelajaran, interaksi antara pendidik dan peserta didik, keteladanan, budaya sekolah, serta pengalaman sosial yang berlangsung selama proses pendidikan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pendidikan nilai tidak hanya ditentukan oleh isi kurikulum, tetapi juga oleh lingkungan belajar dan praktik pedagogis yang memungkinkan nilai dipahami serta dialami secara konkret. Dalam konteks tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki relevansi khusus karena berkaitan langsung dengan

pembentukan orientasi moral, tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap hak orang lain, dan partisipasi dalam kehidupan bersama (Zuriah, 2021). Dengan demikian, pendidikan nilai dalam PKn perlu dipahami sebagai proses yang menghubungkan pengetahuan normatif dengan pembentukan disposisi dan perilaku kewargaan.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Nilai

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kapasitas peserta didik untuk memahami hak dan kewajiban, berpartisipasi dalam kehidupan demokratis, serta menjalankan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Orientasi tersebut menempatkan PKn tidak hanya sebagai sarana penyampaian pengetahuan mengenai sistem politik, hukum, konstitusi, dan pemerintahan, tetapi juga sebagai ruang pedagogis untuk membangun karakter kewargaan. Dalam konteks Indonesia, pembentukan karakter tersebut berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, prinsip demokrasi, penghormatan terhadap keberagaman, dan komitmen terhadap kehidupan bersama yang adil dan bertanggung jawab (Hasan, 2022; Gunawan & Najicha, 2022). Kedudukan PKn sebagai pendidikan nilai dapat dianalisis melalui keterkaitan antara pengetahuan kewargaan, keterampilan kewargaan, dan karakter kewargaan. Pengetahuan kewargaan mencakup pemahaman terhadap prinsip, norma, hak, dan kewajiban warga negara. Keterampilan kewargaan berkaitan dengan kemampuan berdialog, menilai persoalan publik, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab. Sementara itu, karakter kewargaan mencakup disposisi seperti toleransi, tanggung jawab, kepedulian sosial, penghormatan terhadap perbedaan, dan komitmen terhadap keadilan. Ketiga aspek ini perlu dikembangkan secara terpadu agar pembelajaran tidak berhenti pada penguasaan materi, tetapi juga mendukung kemampuan peserta didik menerapkan nilai dalam kehidupan sosial.

Meskipun demikian, orientasi normatif PKn tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan internalisasi nilai. Pembelajaran yang didominasi ceramah, hafalan, dan penilaian berbasis pengetahuan berisiko membatasi kesempatan peserta didik untuk menguji nilai melalui pengalaman dan interaksi sosial. Sebaliknya, pembelajaran yang memberikan ruang bagi diskusi dilema moral, simulasi, bermain peran, kerja kolaboratif, dan refleksi dapat membantu peserta didik memahami konsekuensi suatu tindakan serta mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Perhatian terhadap strategi pembelajaran ini sejalan dengan kajian mengenai peningkatan kualitas pembelajaran PKn melalui model bermain peran (Syam, 2011) dan penanaman nilai karakter dalam pembelajaran PPKn (Sayektiningsih et al., 2017). Berdasarkan perspektif tersebut, efektivitas PKn sebagai pendidikan nilai perlu dilihat dari keterpaduan tujuan pembelajaran, strategi pedagogis, interaksi di kelas, dan kesempatan untuk menerapkan nilai dalam konteks nyata. Pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada nilai bukan sekadar mengajarkan peserta didik mengenai perilaku yang dianggap benar, melainkan juga membangun kemampuan untuk memberikan alasan moral, menghargai perbedaan, mengevaluasi konsekuensi tindakan, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Orientasi ini penting agar karakter kewargaan berkembang melalui proses pembelajaran yang reflektif dan partisipatif, bukan hanya melalui penerimaan terhadap norma yang disampaikan oleh pendidik.

Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus landasan normatif bagi pengembangan kehidupan sosial, politik, dan kewargaan di Indonesia. Dalam pembelajaran PKn, Pancasila menyediakan kerangka nilai untuk memahami hubungan antara individu, masyarakat, dan negara, termasuk mengenai tanggung jawab moral, penghormatan terhadap martabat manusia,

persatuan dalam keberagaman, pengambilan keputusan secara demokratis, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila tidak seharusnya diposisikan hanya sebagai materi yang harus diketahui dan dihafalkan, tetapi juga sebagai prinsip yang digunakan untuk menganalisis persoalan sosial dan menuntun pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari (Samani & Hariyanto, 2011; Zuriah, 2021). Kelima sila Pancasila mengandung dimensi nilai yang saling berhubungan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa berkaitan dengan kehidupan beragama dan penghormatan terhadap keyakinan; sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan pentingnya martabat manusia dan perlakuan yang adil; sila Persatuan Indonesia menekankan solidaritas kebangsaan di tengah keberagaman; sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menggarisbawahi musyawarah dan partisipasi demokratis; sedangkan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengarahkan perhatian pada keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai tersebut dapat menjadi dasar untuk mengembangkan sikap saling menghormati, tanggung jawab, keterbukaan terhadap perbedaan, kemampuan bermusyawarah, dan kepedulian terhadap persoalan sosial.

Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam PKn memerlukan pendekatan pembelajaran yang menghubungkan prinsip normatif dengan pengalaman konkret peserta didik. Sebagai contoh, nilai kemanusiaan dapat dikembangkan melalui analisis kasus diskriminasi dan perundungan; nilai persatuan melalui kerja kolaboratif antarpeserta didik yang memiliki latar belakang berbeda; nilai kerakyatan melalui diskusi dan pengambilan keputusan bersama; serta nilai keadilan sosial melalui kajian terhadap persoalan ketimpangan dan distribusi tanggung jawab. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran Pancasila dapat diarahkan pada pengembangan penalaran moral dan partisipasi sosial, bukan hanya pada reproduksi pengetahuan mengenai isi setiap sila. Namun, penerapan nilai Pancasila dalam pembelajaran perlu mempertimbangkan kemungkinan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual dan perilaku aktual. Peserta didik dapat memahami pentingnya toleransi secara teoritis, tetapi masih mengalami kesulitan menerapkannya ketika berhadapan dengan perbedaan pandangan atau identitas. Karena itu, internalisasi nilai membutuhkan konsistensi antara materi pembelajaran, keteladanan pendidik, budaya sekolah, dan pengalaman sosial peserta didik. Evaluasi pembelajaran juga perlu memperhatikan proses penalaran, kualitas partisipasi, tanggung jawab dalam kerja kelompok, serta kemampuan merefleksikan tindakan, dengan tetap menghindari penilaian yang menyederhanakan karakter sebagai sesuatu yang dapat diukur hanya melalui satu perilaku atau satu instrumen.

Secara keseluruhan, pendidikan nilai, Pendidikan Kewarganegaraan, dan nilai-nilai Pancasila membentuk kerangka konseptual yang saling berkaitan. Pendidikan nilai memberikan orientasi pedagogis bagi proses pemahaman, penghayatan, dan penerapan nilai; PKn menyediakan ruang pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewargaan; sedangkan Pancasila menjadi landasan normatif yang memberi arah pada pembentukan karakter dalam konteks Indonesia. Keterkaitan ini menegaskan bahwa keberhasilan PKn sebagai pendidikan nilai bergantung pada kemampuan pembelajaran untuk menjembatani dimensi pengetahuan, penghayatan moral, dan tindakan sosial. Kerangka tersebut dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai kewargaan diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan kondisi pedagogis yang mendukung penerapannya dalam kehidupan peserta didik.

Tabel 1. Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Sila Pancasila	Nilai Utama	Implementasi dalam PKn
Ketuhanan yang Maha Esa	Religius	Toleransi beragama dan penghormatan keyakinan
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Kemanusiaan	Sikap adil, empati, dan penghormatan HAM

Persatuan Indonesia	Nasionalisme	Cinta tanah air dan persatuan
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan	Demokrasi	Musyawarah dan partisipasi
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	Keadilan	Kepedulian sosial dan tanggung jawab

Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap sila Pancasila mengandung nilai utama yang dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai landasan pembentukan karakter peserta didik. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan nilai religius yang diimplementasikan melalui sikap toleransi beragama dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan nilai kemanusiaan yang diwujudkan melalui perilaku adil, empati, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia, menekankan nilai nasionalisme yang tercermin dalam sikap cinta tanah air, menjaga persatuan, dan menghargai keberagaman.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengandung nilai demokrasi yang dapat dikembangkan melalui pembiasaan musyawarah, penghargaan terhadap pendapat yang berbeda, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan bersama. Sementara itu, sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan nilai keadilan yang diimplementasikan melalui kepedulian sosial, sikap adil, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama. Secara keseluruhan, tabel tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PKn tidak cukup diajarkan sebagai konsep normatif, tetapi perlu diinternalisasikan melalui pengalaman belajar yang konkret, reflektif, dan partisipatif. Implementasi nilai-nilai tersebut diharapkan dapat membantu peserta didik mengembangkan karakter yang religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, PKn berperan bukan hanya dalam meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan, melainkan juga dalam membentuk sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian Terdahulu yang relavan

No.	Peneliti (Tahun)	Fokus Penelitian	Research Gap
1	Dewi dan Abdulkarim (2018)	Kualitas pembelajaran PKn dalam mengembangkan nilai nasionalisme siswa.	Penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengkaji integrasi nilai Pancasila, penghayatan moral, dan tindakan sosial dalam pembentukan karakter kewargaan.
2	Syam (2011)	Peningkatan kualitas pembelajaran PKn melalui model bermain peran.	Perlu sintesis yang menghubungkan strategi pembelajaran dengan internalisasi nilai dan pembentukan karakter kewargaan.
3	Sayektiningsih et al. (2017)	Penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran PPKn.	Kajian dapat diperluas dengan menghubungkan pembelajaran, keteladanan pendidik, budaya sekolah, serta dukungan lingkungan sosial.
4	Zuriah (2021)	Penanaman nilai karakter Pancasila dalam pembelajaran PPKn berbasis polysynchronous.	Perlu pembahasan yang lebih luas mengenai hubungan pendekatan pembelajaran dengan pembentukan karakter kewargaan dalam berbagai konteks pendidikan.

5	Hasan (2022)	Implementasi nilai pendidikan karakter melalui PKn.	Perlu penjelasan integratif mengenai hubungan pengetahuan kewargaan, penghayatan nilai, dan tindakan nyata peserta didik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) untuk menganalisis Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai wahana pendidikan nilai dan pembentukan karakter peserta didik. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji konsep, perspektif teoretis, serta temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendidikan nilai, pendidikan karakter, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PKn. Melalui kajian literatur, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi keterkaitan antarkonsep, menyintesis argumentasi akademik, dan menguraikan tantangan implementasi pendidikan nilai dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Sumber data penelitian meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen kebijakan pendidikan yang relevan dengan fokus kajian. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan topik pendidikan nilai, pendidikan karakter, tujuan dan praktik pembelajaran PKn, serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan formal. Dokumen kebijakan, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, digunakan untuk memahami landasan normatif penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Artikel jurnal dan buku akademik digunakan untuk membangun landasan konseptual serta mengidentifikasi hasil kajian yang relevan dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses ini mencakup identifikasi sumber, pemeriksaan relevansi isi, pencatatan gagasan utama, serta pengelompokan informasi berdasarkan tema kajian. Informasi yang dikumpulkan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu konsep pendidikan nilai, peran PKn dalam pembentukan karakter kewargaan, dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran. Pengelompokan tersebut digunakan untuk menjaga keterkaitan antara sumber literatur, fokus analisis, dan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan identifikasi, kategorisasi, perbandingan, interpretasi, dan sintesis literatur. Pada tahap identifikasi dan kategorisasi, informasi dari setiap sumber dikelompokkan berdasarkan tema dan konsep yang relevan. Selanjutnya, tahap perbandingan digunakan untuk mengkaji persamaan, perbedaan, serta penekanan konseptual dalam berbagai sumber. Tahap interpretasi dan sintesis dilakukan dengan menghubungkan temuan literatur untuk membangun pemahaman yang menyeluruh mengenai kedudukan PKn sebagai pendidikan nilai, tantangan internalisasi nilai dalam pembelajaran, dan implikasinya terhadap pembentukan karakter peserta didik. Untuk menjaga ketelitian analisis, interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi sumber terhadap fokus penelitian serta konsistensi antara argumentasi yang dikembangkan dan informasi yang dirujuk. Hasil analisis kemudian disusun secara tematik untuk menjelaskan hubungan antara landasan konseptual pendidikan nilai, peran pedagogis PKn, dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Melalui prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan sintesis konseptual yang dapat memperkaya pemahaman mengenai pengembangan pembelajaran PKn yang berorientasi pada internalisasi nilai dan pembentukan karakter kewargaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Karakter

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter peserta didik melalui pengembangan pengetahuan kewargaan, orientasi moral, dan tanggung jawab sosial. Peran tersebut berkaitan dengan fungsi PKn yang tidak hanya memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, sistem hukum, serta prinsip kehidupan demokratis, tetapi juga mengembangkan nilai dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Kajian mengenai pendidikan kewarganegaraan dan karakter moral menegaskan relevansi PKn dalam membangun karakter peserta didik, sedangkan penelitian tentang pembelajaran kewarganegaraan menunjukkan pentingnya pengintegrasian nilai kebangsaan ke dalam proses pembelajaran (Dewi & Abdulkarim, 2018; Gunawan & Najicha, 2022). Secara konseptual, kontribusi PKn terhadap pembentukan karakter dapat dijelaskan melalui tiga dimensi yang saling berkaitan. Pertama, dimensi kognitif berkaitan dengan pemahaman peserta didik terhadap nilai moral, norma hukum, prinsip demokrasi, dan nilai-nilai Pancasila. Kedua, dimensi afektif mencakup pengembangan empati, toleransi, kepedulian sosial, dan komitmen terhadap nilai yang dipelajari. Ketiga, dimensi perilaku berkaitan dengan kemampuan menerapkan nilai tersebut dalam interaksi sosial dan pengambilan keputusan. Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan karakter tidak cukup dinilai dari kemampuan peserta didik menjelaskan konsep moral, tetapi juga perlu memperhatikan proses penghayatan dan penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan nasionalisme merupakan contoh nilai yang relevan untuk dikembangkan melalui pembelajaran PKn. Kejujuran dan tanggung jawab dapat dibangun melalui pelaksanaan tugas secara etis dan pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil. Toleransi dapat dikembangkan melalui dialog yang menghargai perbedaan pandangan, sedangkan nasionalisme dapat ditumbuhkan melalui pemahaman mengenai identitas kebangsaan, persatuan, dan tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Dalam konteks ini, pembelajaran PKn berpotensi menjadi ruang untuk menghubungkan nilai-nilai normatif dengan pengalaman sosial peserta didik. Namun, hubungan antara pembelajaran PKn dan pembentukan karakter tidak bersifat otomatis. Penguasaan pengetahuan mengenai nilai moral belum tentu menghasilkan perilaku yang konsisten dengan nilai tersebut. Internalisasi nilai dipengaruhi pula oleh keteladanan pendidik, budaya sekolah, interaksi antarpeserta didik, dan lingkungan sosial yang lebih luas. Oleh sebab itu, peran PKn perlu dipahami sebagai bagian dari ekosistem pendidikan karakter yang melibatkan proses pembelajaran dan pengalaman sosial secara berkelanjutan. Implikasi ini menegaskan bahwa pembelajaran PKn perlu dirancang bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konseptual, melainkan juga untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mempraktikkan, merefleksikan, dan mengevaluasi nilai yang dipelajari.

Tabel 2. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Karakter

Aspek karakter	Peran PKn	Indikator penerapan dalam pembelajaran
Moral	Mengembangkan integritas dan pertimbangan etis	Kejujuran akademik, konsistensi antara pernyataan dan tindakan, serta tanggung jawab terhadap keputusan
Sosial	Menumbuhkan toleransi, empati, dan kepedulian	Menghargai perbedaan pendapat, bekerja sama, dan menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain
Nasionalisme	Memperkuat identitas dan komitmen kebangsaan	Menghargai keberagaman, menjaga persatuan, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat

Demokrasi	Mengembangkan partisipasi dan tanggung jawab kewargaan	Berdiskusi secara terbuka, bermusyawarah, menghargai hak orang lain, dan menerima keputusan bersama secara bertanggung jawab

Sumber: Sintesis konseptual penulis berdasarkan literatur yang dikaji

Tabel 2 memperlihatkan bahwa peran PKn dalam pembentukan karakter mencakup dimensi moral, sosial, kebangsaan, dan demokrasi. Setiap dimensi memiliki orientasi pembelajaran dan indikator penerapan yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam membentuk karakter kewargaan. Keempat aspek tersebut juga menunjukkan bahwa pendidikan karakter perlu dioperasionalkan ke dalam aktivitas pembelajaran yang dapat diamati dan direfleksikan, tanpa menyederhanakan karakter peserta didik menjadi sekadar hasil pengukuran perilaku sesaat.

Tantangan Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Meskipun memiliki landasan normatif dan tujuan pedagogis yang kuat, implementasi PKn sebagai pendidikan nilai menghadapi tantangan dalam menghubungkan materi pembelajaran dengan perilaku nyata peserta didik. Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan aspek kognitif, seperti pemahaman konsep, hafalan norma, dan penguasaan ketentuan hukum. Apabila pendekatan tersebut tidak disertai kegiatan refleksi, dialog, dan penerapan nilai, pembelajaran berisiko menghasilkan pemahaman yang bersifat deklaratif. Peserta didik dapat mengetahui perilaku yang dianggap benar, tetapi belum tentu memiliki kesempatan yang memadai untuk memahami alasan moral di baliknya atau menerapkannya dalam situasi yang kompleks. Tantangan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan waktu pembelajaran dan variasi strategi pedagogis. Pendidikan nilai membutuhkan proses yang berkelanjutan karena penghayatan nilai berkembang melalui pembiasaan, pengalaman, dialog, dan refleksi. Apabila pembelajaran hanya berlangsung dalam bentuk penyampaian materi dan penyelesaian target kurikulum, kesempatan peserta didik untuk mendiskusikan dilema moral, mempertimbangkan perspektif yang berbeda, dan mengevaluasi konsekuensi tindakan menjadi terbatas. Dalam konteks ini, penggunaan metode pembelajaran yang partisipatif, termasuk bermain peran, dapat menjadi alternatif untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual. Kajian Syam (2011) mengenai model bermain peran dalam pembelajaran PKn relevan untuk mendiskusikan pentingnya variasi strategi pedagogis, meskipun efektivitas setiap metode tetap perlu ditelaah berdasarkan konteks dan bukti empirisnya.

Selain strategi pembelajaran, keteladanan dan konsistensi lingkungan pendidikan juga menjadi faktor penting. Nilai yang diajarkan di kelas dapat kehilangan makna apabila tidak tercermin dalam interaksi sehari-hari di sekolah. Sebagai contoh, pembelajaran tentang demokrasi akan kurang bermakna apabila peserta didik tidak memperoleh kesempatan menyampaikan pendapat secara aman dan dihargai. Demikian pula, pendidikan tentang keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia sulit diinternalisasi apabila praktik keseharian justru memperlihatkan perlakuan yang diskriminatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan nilai bukan semata-mata persoalan isi mata pelajaran, melainkan juga berkaitan dengan kesesuaian antara pesan normatif, perilaku pendidik, dan budaya institusi pendidikan. Perkembangan teknologi digital dan arus informasi global turut menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi pendidikan nilai. Peserta didik berinteraksi dengan beragam pandangan, representasi identitas, dan informasi yang dapat memengaruhi pemahaman mereka tentang tanggung jawab sosial, kebangsaan, dan keberagaman. Oleh karena itu, pembelajaran PKn perlu mengembangkan literasi digital, kemampuan mengevaluasi informasi, etika berkomunikasi, serta tanggung jawab dalam berpartisipasi di

ruang digital. Tantangannya bukan sekadar menolak nilai atau pengaruh yang berasal dari luar, melainkan membekali peserta didik dengan kemampuan menilai informasi secara kritis berdasarkan prinsip kemanusiaan, demokrasi, persatuan, dan keadilan. Berdasarkan uraian tersebut, tantangan utama implementasi pendidikan nilai dalam PKn terletak pada kesenjangan potensial antara tujuan normatif, praktik pedagogis, dan pengalaman sosial peserta didik. Kesenjangan ini perlu ditangani melalui pembelajaran yang lebih reflektif dan partisipatif, penguatan keteladanan, serta penciptaan lingkungan pendidikan yang konsisten dengan nilai-nilai yang diajarkan. Karena penelitian ini berbasis studi literatur, uraian tersebut merupakan sintesis konseptual dan tidak dapat diperlakukan sebagai pengukuran langsung mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pembelajaran PKn di seluruh satuan pendidikan.

Strategi Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Nilai

Penguatan PKn sebagai pendidikan nilai memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan tujuan kurikuler, strategi pedagogis, kompetensi pendidik, dan lingkungan sosial peserta didik. Strategi tersebut perlu diarahkan untuk membangun hubungan yang bermakna antara pengetahuan kewargaan, penghayatan nilai, dan tindakan sosial. Dengan demikian, penguatan pendidikan nilai tidak cukup dilakukan dengan menambahkan materi karakter ke dalam kurikulum, tetapi juga perlu diwujudkan melalui pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik memahami, mempertanyakan, mendiskusikan, dan menerapkan nilai dalam situasi konkret. Pertama, integrasi pendidikan nilai dalam kurikulum perlu dilakukan secara eksplisit dan kontekstual. Nilai-nilai Pancasila dapat dihubungkan dengan materi hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, supremasi hukum, keberagaman, dan keadilan sosial. Pengintegrasian tersebut sebaiknya tidak berhenti pada pencantuman nilai dalam tujuan pembelajaran, tetapi juga tercermin dalam aktivitas, bahan ajar, dan evaluasi. Sebagai contoh, pembelajaran tentang demokrasi dapat menggunakan simulasi musyawarah, sedangkan pembahasan mengenai hak asasi manusia dapat dikembangkan melalui analisis kasus yang menuntut peserta didik mengidentifikasi persoalan, menimbang perspektif yang berbeda, dan memberikan alasan atas keputusan yang diambil.

Kedua, kompetensi pedagogis pendidik perlu diperkuat agar pembelajaran PKn tidak didominasi penyampaian materi secara satu arah. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang membangun ruang dialog, mendorong penalaran kritis, dan memberikan keteladanan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Metode diskusi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, bermain peran, dan refleksi tertulis dapat digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran serta karakteristik peserta didik. Strategi-strategi tersebut memungkinkan peserta didik terlibat secara aktif dalam mengeksplorasi persoalan moral dan kewargaan, bukan sekadar menerima kesimpulan yang telah ditentukan. Ketiga, penguatan PKn perlu didukung oleh sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nilai yang dipelajari di sekolah akan lebih mudah memperoleh makna ketika peserta didik menemukan kesempatan untuk menerapkannya dalam berbagai lingkungan sosial. Keluarga dapat mendukung pembiasaan tanggung jawab dan penghormatan terhadap orang lain, sedangkan sekolah dapat membangun budaya dialog, keadilan, dan partisipasi. Masyarakat menyediakan konteks yang lebih luas bagi pengembangan kepedulian sosial dan keterlibatan warga negara. Sinergi tersebut penting karena pembentukan karakter merupakan proses jangka panjang yang tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada satu mata pelajaran atau satu institusi pendidikan.

Keempat, evaluasi pembelajaran perlu mencakup lebih dari sekadar penguasaan pengetahuan. Penilaian dapat dilengkapi dengan refleksi peserta didik, observasi partisipasi, penilaian proses kerja kelompok, dan analisis terhadap cara peserta didik memberikan alasan

dalam menghadapi persoalan kewargaan. Instrumen tersebut perlu digunakan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan konteks dan perkembangan peserta didik. Tujuannya bukan memberi label moral kepada individu, melainkan memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai proses belajar, perkembangan penalaran, dan kesempatan penerapan nilai. Secara keseluruhan, strategi penguatan PKn sebagai pendidikan nilai perlu bertumpu pada keterpaduan kurikulum, praktik pedagogis, keteladanan, lingkungan sosial, dan evaluasi pembelajaran. Integrasi kelima unsur tersebut dapat membangun kondisi yang lebih mendukung bagi peserta didik untuk menghubungkan pengetahuan kewargaan dengan penghayatan moral dan tindakan sosial. Akan tetapi, strategi tersebut perlu dipahami sebagai arah pengembangan pedagogis yang memerlukan pengujian dan evaluasi sesuai konteks pendidikan, bukan sebagai jaminan otomatis terhadap terbentuknya karakter tertentu.

Hasil kajian memperlihatkan tiga pokok argumentasi yang saling berhubungan. Pertama, PKn memiliki landasan konseptual yang kuat sebagai wahana pendidikan nilai karena mengintegrasikan pengetahuan mengenai kehidupan bernegara dengan pengembangan tanggung jawab moral dan sosial. Kedua, potensi tersebut dapat menghadapi hambatan ketika pembelajaran terlalu menekankan aspek kognitif dan tidak didukung keteladanan serta pengalaman penerapan nilai. Ketiga, penguatan PKn memerlukan pendekatan pedagogis yang reflektif, partisipatif, kontekstual, dan didukung oleh lingkungan pendidikan yang konsisten. Sintesis ini menunjukkan bahwa persoalan mendasar pendidikan nilai bukan hanya terletak pada nilai apa yang diajarkan, tetapi juga pada bagaimana nilai tersebut dipahami, dialami, dan diterapkan oleh peserta didik. Oleh karena itu, kontribusi PKn terhadap pembentukan karakter perlu dianalisis melalui keterkaitan antara tujuan pembelajaran, proses pedagogis, dan lingkungan sosial. Perspektif ini memperluas pemahaman mengenai PKn dari sekadar mata pelajaran yang menyampaikan norma kewargaan menjadi ruang pendidikan yang berpotensi mendukung pengembangan penalaran moral, partisipasi demokratis, dan tanggung jawab sosial. Meskipun demikian, karena kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur, kesimpulan yang dihasilkan terutama berada pada tingkat konseptual. Kajian ini belum membuktikan secara empiris besarnya pengaruh metode pembelajaran tertentu terhadap perubahan karakter peserta didik. Penelitian lanjutan dapat menguji bagaimana strategi pembelajaran yang berbeda diterapkan dalam konteks sekolah yang beragam serta bagaimana perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku kewargaan dapat dinilai secara valid dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan PKn sebagai pendidikan nilai memerlukan dialog berkelanjutan antara kajian konseptual, praktik pembelajaran, dan bukti empiris.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis sebagai wahana pendidikan nilai dalam pembentukan karakter kewargaan peserta didik. Peran tersebut tidak terbatas pada pengembangan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban warga negara, sistem hukum, dan prinsip demokrasi, tetapi juga mencakup penghayatan serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai religiusitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial menjadi landasan bagi pengembangan karakter yang bertanggung jawab, toleran, partisipatif, dan memiliki kepedulian terhadap kehidupan bersama. Kajian ini juga menunjukkan bahwa potensi PKn sebagai pendidikan nilai menghadapi tantangan berupa kecenderungan pembelajaran yang berorientasi pada aspek kognitif, keterbatasan pengalaman belajar yang reflektif dan partisipatif, serta belum tentu konsistennya hubungan antara nilai yang diajarkan dan praktik kehidupan di lingkungan pendidikan. Kondisi

tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan nilai tidak cukup ditentukan oleh muatan kurikulum, tetapi juga oleh strategi pedagogis, keteladanan pendidik, budaya sekolah, dan dukungan keluarga serta masyarakat. Oleh karena itu, penguatan PKn perlu diarahkan pada pembelajaran yang kontekstual, dialogis, reflektif, dan partisipatif, disertai evaluasi yang memperhatikan perkembangan penalaran moral, tanggung jawab sosial, dan penerapan nilai dalam kehidupan peserta didik.

Secara konseptual, kajian ini menegaskan pentingnya menghubungkan pengetahuan kewargaan, penghayatan nilai, dan tindakan sosial sebagai dimensi yang saling melengkapi dalam pendidikan karakter. Implikasi praktisnya adalah perlunya pengembangan pembelajaran PKn yang tidak hanya menyampaikan nilai-nilai Pancasila secara normatif, tetapi juga menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik mendiskusikan persoalan nyata, menghargai perbedaan, mengambil keputusan secara bertanggung jawab, dan merefleksikan tindakannya. Namun, karena penelitian ini menggunakan studi literatur, kesimpulan yang dihasilkan bersifat konseptual dan belum membuktikan secara empiris efektivitas strategi pembelajaran tertentu. Penelitian selanjutnya perlu menguji penerapan pendekatan tersebut dalam berbagai konteks pendidikan untuk memahami bagaimana proses pembelajaran PKn dapat mendukung internalisasi nilai dan pembentukan karakter kewargaan secara berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis konseptual yang memosisikan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bukan sekadar sebagai sarana transfer pengetahuan tentang hak, kewajiban, dan sistem kenegaraan, melainkan sebagai ekosistem pendidikan nilai yang mengintegrasikan pengetahuan kewargaan, penghayatan nilai-nilai Pancasila, dan tindakan sosial dalam pembentukan karakter kewargaan peserta didik. Berbeda dari pembahasan yang berfokus pada penanaman nilai atau strategi pembelajaran secara terpisah, kajian ini menghubungkan dimensi pembelajaran di kelas dengan keteladanan pendidik, budaya sekolah, serta dukungan keluarga dan masyarakat sebagai unsur yang saling melengkapi dalam proses internalisasi nilai. Sintesis tersebut menghasilkan kerangka pemahaman bahwa pembentukan karakter melalui PKn memerlukan keselarasan antara nilai yang diajarkan, pengalaman belajar yang reflektif dan partisipatif, serta kesempatan untuk menerapkan nilai dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, kontribusi kajian ini adalah memperkuat perspektif integratif tentang PKn sebagai pendidikan nilai sekaligus mengidentifikasi arah pengembangan pembelajaran dan penelitian empiris berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, N., & Abdulkarim, A. (2018). Kualitas pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan nilai-nilai nasionalisme siswa. Jurnal AKP, 8(1).

Gunawan, R. Z., & Najicha, F. U. (2022). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter moral pelajar. Jurnal Kewarganegaraan, 6(1).

Hasan, R. (2022). Implementasi nilai pendidikan karakter melalui pendidikan kewarganegaraan. VOCATECH, 4(1).

Maksudin. (2013). Pendidikan karakter non-dikotomik. Pustaka Pelajar.

Samani, M., & Hariyanto. (2011). Pendidikan karakter. Remaja Rosdakarya.

Sayektiningsih, S., Sumardjoko, B., & Muhibin, A. (2017). Penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran PPKn. Jurnal Manajemen Pendidikan, 12(2).

Syam, N. (2011). Peningkatan kualitas pembelajaran PKn melalui model bermain peran. Perspektif Ilmu Pendidikan, 24.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003).

Winarno. (2014). Pendidikan kewarganegaraan. Bumi Aksara.

Zuriah, N. (2021). Penanaman nilai-nilai karakter Pancasila dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis polysynchronous. Jurnal Moral Kemasyarakatan, 6(1).